

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, UPAH
MINIMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Neza Plouna Iftita Ilmi

NIM: 1656200167

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang Untuk memenuhi Salat Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

TAHUN AKADEMIK 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yang lebih baik atau meningkat dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mensejahterakan masyarakat. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.¹

Teori ekonomi pembangunan adalah penjelasan mengenai variabel-variabel apa yang menentukan kenaikan *output* perkapita suatu masyarakat atau bangsa dalam jangka panjang dan bagaimana variabel-variabel tersebut berinteraksi satu dengan yang lain sehingga terjadi proses pembangunan. Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan nasional adalah laju pembangunan dari manusia itu sendiri.²

Indeks pembangunan manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya sekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat

¹ M.L. Jinghan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 414.

² Laila Ramadhani Putri, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan”, (UIN Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 1.

terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan.³

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.⁴ Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).⁵

Pengklasifikasi indeks pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik antara lain:

1. Daerah dengan tingkat pembangunan manusia rendah apabila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 60.
2. Daerah dengan tingkat pembangunan manusia sedang apabila memiliki nilai IPM antara 60 sampai 70.
3. Daerah dengan tingkat pembangunan manusia tinggi apabila memiliki nilai IPM antara 70 sampai 80.
4. Daerah dengan tingkat pembangunan manusia yang sangat tinggi apabila memiliki nilai IPM lebih dari 80.⁶

³ Badan Pusat Statistik, Sumatera Selatan. “Indeks Pembangunan Manusia”. <www.sumsel.bps.go.id> Diakses pada tanggal 9 Januari 2020.

⁴ Dewi A. Meydiasari dan Ady Soejoto. “Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia”, *JPEK*, 1, No. 02, (2017), hlm. 118.

⁵ Septiana M. M. Sanggelorang dkk, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara”, *JBIE*, 15, No. 02, (2015), hlm. 2.

⁶ Badan Pusat Statistik, Sumatera Selatan. “Indeks Pembangunan Manusia”. <www.sumsel.bps.go.id> Diakses pada tanggal 11 Januari 2020.

Menurut data publikasi BPS Pusat, indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan telah mengalami peningkatan yang cukup berarti pada beberapa tahun terakhir, yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2011-2018 (Persentase)

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia				
	Palembang	Muara Enim	Musi Banyuasin	Banyuasin	Sumatera Selatan
2011	74.08	62.82	62.56	61.04	65.12
2012	74.74	63.34	63.27	61.69	65.79
2013	75.49	64.34	64.18	62.42	66.16
2014	76.02	65.02	64.93	63.21	66.75
2015	76.29	65.82	65.76	64.15	67.46
2016	76.59	66.71	66.45	65.01	68.24
2017	77.22	67.63	66.96	65.85	68.86
2018	77.89	68.28	67.57	66.40	69.39

Sumber: BPS, Sumatera Selatan.

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 tingkat indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan sebesar 65,12% kemudian naik menjadi 65,79% di tahun 2012. Dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai tahun 2018. Namun, walaupun capaian kinerja IPM Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang cukup baik, akan tetapi ternyata peningkatan tersebut tidak cukup kuat untuk mengangkat posisi relatif IPM Sumatera Selatan ke tingkat yang diharapkan. Posisi relatif IPM Sumatera Selatan berada di peringkat ke – 22 pada tahun 2011-2013 dan meningkat ke – 23 pada tahun 2014 dan tetap konstan sampai tahun 2018. Posisi ini tampak jauh dari posisi yang

ditargetkan, bahkan capaian ini menjadi tampak buruk mengingat berbagai dimensi pembangunan daerah lainnya justru menunjukkan kinerja yang cukup impresif, seperti kenaikan pengeluaran pemerintah, kenaikan upah minimum kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tolak ukur dalam pembangunan ekonomi antara lain adalah dengan melihat pencapaian suatu negara terhadap peningkatan modal manusianya itu sendiri. Modal manusia adalah hal yang penting dalam melihat pembangunan ekonomi karena modal manusia tidak hanya melihat aspek ekonomi melalui pendapatan, tetapi juga melihat dalam aspek sosial yang diantaranya membutuhkan kehidupan layak melalui pendidikan dan kesehatan. Besarnya pendapatan dapat memenuhi kriteria kehidupan yang layak, dan kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan serta pendidikan merupakan hal utama untuk mencapai kehidupan yang layak.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Melalui berbagai macam kebijakan salah satunya adalah pengeluaran pemerintah yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang direfleksikan melalui indeks pembangunan manusia.

Pengalokasian pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja berdasarkan fungsi yang tepat akan menyebabkan terhindarnya dari kondisi *multiplier* ekonomi. Berdasarkan PM Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 33 klasifikasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja berdasarkan fungsi terbagi menjadi sembilan fungsi yakni pelayanan

umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.⁷ Di antara fungsi tersebut, tanpa mengesampingkan fungsi yang lain, terdapat tiga fungsi yang perlu diteliti terlebih melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Untuk mendorong dan mewujudkan aspek tersebut dibutuhkan sebuah alokasi anggaran yang tepat yang terangkum dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dalam suatu daerah. Alokasi anggaran yang tepat diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia.

Tabel 1.2
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Per Fungsi (dalam Jutaan Rupiah)

	Tahun	Ekonomi	Kesehatan	Pendidikan
Palembang	2011	87.921	130.131	809.678
	2012	92.746	166.615	1.106.632
	2013	112.428	167.827	1.222.086
	2014	120.692	282.701	1.176.111
	2015	97.097	36.390	48.789
	2016	113.261	366.568	1.208.113
	2017	105.218	441.621	1.191.082
	2018	122.382	417.295	1.162.518
Muara Enim	2011	80.053	156.129	482.977
	2012	156.152	232.675	516.157
	2013	141.015	178.107	560.861

⁷ Sintong Ariansyah, "Analisis Pengaruh Pengeluaran pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto Di Indonesia", *Indonesian Treasury Review*, 3, No.4, (2018), hlm. 271.

	2014	171.579	189.273	558.725
	2015	146.198	70.566	63.780
	2016	245.192	294.066	567.152
	2017	140.305	401.307	604.421
	2018	162.275	354.713	603.628
Musi Banyuasin	2011	168.025	193.899	537.899
	2012	285.033	208.591	580.800
	2013	441.776	245.052	637.797
	2014	465.846	332.104	615.521
	2015	136.033	52.140	105.085
	2016	173.906	324.177	676.727
	2017	120.961	378.134	668.222
	2018	140.141	354.896	685.669
Banyuasin	2011	107.057	88.183	369.796
	2012	138.074	111.554	543.847
	2013	183.563	118.304	574.524
	2014	212.230	156.569	647.264
	2015	116.533	58.941	59.039
	2016	129.895	237.238	545.911
	2017	101.277	219.273	715.539
	2018	82.994	260.967	623.609
Sumatera Selatan	2011	335.396	296.520	255.982
	2012	367.238	238.378	249.203
	2013	372.880	176.955	237.021
	2014	394.813	179.933	251.226
	2015	245.698	53.690	115.320
	2016	294.504	188.938	130.162
	2017	281.945	372.597	1.597.165
	2018	296.405	433.163	1.757.783

Sumber: DJPK, data diolah.

Berdasarkan tabel 1.2 anggaran pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada fungsi ekonomi mengalami peningkatan yang

positif mulai dari tahun 2011 sampai pada tahun 2014 saja dan mengalami penurunan pada tahun 2015 dari yang sebelumnya sebesar Rp.394.813 menjadi Rp.245.698. lalu mengalami peningkatan dan penurunan kembali pada tahun 2016 sampai 2018 menjadi Rp.296.405. Pada anggaran fungsi kesehatan terus mengalami penurunan sampai tahun 2013 dan mengalami penurunan yang cukup besar kurang lebih dua kali lipat dari tahun sebelumnya pada tahun 2015 dari yang sebelumnya Rp.179.955 menjadi Rp.53.690. Sedangkan anggaran pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan mengalami penurunan yang berkelanjutan pada tahun 2011 sampai tahun 2015 dan 2016 dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yakni Rp.1.597.165 dan Rp.1.757.782 pada tahun 2018.

Dengan adanya peran pemerintah dalam melakukan pengeluaran untuk sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas dan pelayanan baik di sektor ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.

Disamping pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota juga dapat mempengaruhi tingkat pembangunan manusia. Bila menyangkut masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah minimum kota. Berdasarkan Bappeda, Sumatera Selatan "Upah minimum merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum kota suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya."⁸

⁸ Bappeda. Sumatera Selatan. "Indikator Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Selatan". <www.bappeda.sumselprov.go.id>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2020.

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Upah minimum kota merupakan komponen dari pendapatan seseorang yang tinggal di suatu daerah sehingga tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara.⁹

Tabel 1.3

Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2011-2018 (Rupiah)

Tahun	Upah Minimum Kabupaten/Kota				
	Palembang	Muara Enim	Banyuasin	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
2011	1.095.831	1.048.440	1.048.440	1.048.440	1.048.440
2012	1.271.000	1.195.220	1.195.220	1.195.220	1.195.220
2013	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2014	1.850.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
2015	2.053.000	1.974.346	1.974.346	1.974.346	1.974.346
2016	2.294.000	2.289.491	2.241.936	2.281.000	2.206.000
2017	2.484.000	2.388.000	2.426.311	2.388.000	2.388.000
2018	2.700.360	2.694.240	2.637.642	2.684.650	2.595.994

Sumber: Disnakertrans Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kenaikan upah minimum kota Palembang pada tahun 2011 sebesar Rp 1.095.831 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Upah minimum kota Palembang pada tahun 2018 mencapai Rp 2.700.360 dan diprediksi akan

⁹ Herman, "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru", *REBR*, 9, No 1, (2018) P.ISSN: 1410-7988. E.ISSN: 2614-123X, hlm. 21.

meningkat lagi pada tahun berikutnya. Berbeda dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim dan Banyuasin, dimana ketiga kabupaten tersebut baru memiliki SK UMK pada tahun 2016. Setiap kabupaten yang tidak atau belum memiliki SK UMK maka akan dikembalikan atau mengikuti kebijakan upah minimum provinsi (UMP). Pada tahun 2016 UMK Muara Enim sebesar Rp. 2.289.491 Banyuasin Rp. 2.241.936 dan Musi Banyuasin sebesar Rp. 2.281.000. tetapi pada tahun 2017 hanya pengajuan UMK Palembang dan Kabupaten Banyuasin yang disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, Kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasi diharuskan untuk mengikuti kebijakan UMP Sumatera Selatan. Barulah pada tahun berikutnya Pengajuan SK UMK Muara Enim dan Musi Banyuasin disetujui. Semakin tinggi tingkat upah minimum, maka akan mencerminkan tingkat ekonomi yang baik.

Peningkatan upah minimum kota akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada indeks pembangunan manusia

Selain dari sisi pengeluaran pemerintah dan upah minimum kabupaten/kota, kondisi pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat indeks pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Beberapa ekonom mendefinisikan bahwa “pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi.”¹⁰ Artinya pembangunan bukan saja mencakup tentang pendapatan nasional saja

¹⁰ Septiana M. M. Sanggelorang dkk. *Op Cit*, hlm. 7.

tetapi juga masalah kegiatan ekonomi seperti pemerataan distribusi pendapatan dan kegiatan usaha di sektor pertanian maupun industri lainnya. Dalam pembangunan ekonomi pendapatan perkapita bisa saja terus meningkat tetapi belum tentu dengan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Berbagai upaya mencapai tujuan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah diperlukan berbagai indikator pengukuran. Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kondisi perekonomian regional secara makro. Secara umum semakin tinggi nilai PDRB berarti semakin tinggi nilai output yang tercipta di wilayah tersebut.

Tabel 1.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2018 (Persentase)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Palembang	6.39	7.75	5.85	5.24	5.44	5.76	6.16	6.69
Muara Enim	12.28	8.27	6.67	3.13	7.62	5.24	8.72	8.65
Musi Banyuasin	3.62	7.25	3.95	4.67	2.28	2.41	3.02	3.23
Banyuasin	5.42	6.15	6.18	5.14	5.56	5.88	5.08	5.14
Sumatera Selatan	6.36	6.83	5.31	4.70	4.50	5.03	5.51	6.04

Sumber: BPS, Sumatera Selatan.

Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sebesar 6.36% lalu mengalami peningkatan sebesar 0,47% pada tahun 2012. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan sehingga menjadi 4.50%. Barulah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

perlahan-lahan pertumbuhan ekonomi mulai meningkat kembali menjadi 6.40% pada tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan terciptanya lapangan kerja yang nantinya akan meningkatkan pembangunan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu teridentifikasi adanya *Research gap* dari variabel independen dan dependent yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5

***Research gap* Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM**

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (Fungsi ekonomi, Kesehatan, Pendidikan) Terhadap Indeks Pembangunan manusia	Pengeluaran pemerintah (Fungsi ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	1. Nur Baeti (2013) 2. Dewi A. Meydiasari dan Ady Soejoto (2017) 3. Sintong Ariansyah (2018)
	Pengeluaran pemerintah (Fungsi ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia	1. Hamzah (2012) 2. Merang Kahang, M. Saleh, Rachmad Budi Suharto (2016)

Sumber : diambil dari berbagai sumber, 2020.

¹¹ Najmi, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia", *Jurnal Humaniora*, 3, No. 1, (2019), hlm. 38.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ariansyah (2018) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sebagaimana dengan hasil penelitian Nur Baeti (2013) dan Dewi dan Ady (2017) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (fungsi kesehatan dan pendidikan) berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian menurut Hamzah (2012) bahwa pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Serta Merang Kahang, M. Saleh, dan Rachmad Budi Suharto (2016) pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Tabel 1.6

***Research gap* Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap IPM**

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Indeks Pembangunan manusia	Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	1. Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) 2. Zainuddin (2015) 3. Herman (2018)
	Upah minimum kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia	1. Muhammad Nurcholis (2014)

Sumber : diambil dari berbagai sumber, 2020.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014), Zainuddin (2015), dan Herman (2018) diketahui bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan hasil penelitian Muhammad Nurcholis (2014) menunjukkan bahwa upah

minimum kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Tabel 1.7

Research gap Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	1. Denni Sulistio Mirza (2012) 2. Septiana Arum Nurul Farida (2018) 3. Isthafan Najmi (2019)
	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.	1. Novita Dewi (2017)

Sumber : diambil dari berbagai sumber, 2020.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Denni Sulistio Mirza (2012), Septiana Arum Nurul Farida (2018), dan Isthafan Najmi (2019). Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita Dewi (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari beberapa hal yang telah dibahas sebelumnya maka penulis ingin melakukan penelitian pada beberapa poin dengan judul “**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan?

2. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu untuk menyelesaikan gelar sarjana ekonomi.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan catatan, koreksi dan acuan untuk dapat mengambil kebijakan dan keputusan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan dapat dipakai sebagai bahan perbandingan peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, dan teknik analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi tentang objek penelitian, analisis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan beserta keterbatasan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian.